

BELANJA PEMERINTAH DAN PERANGKAP KEMISKINAN: ANALISIS WILAYAH TIMUR DAN BARAT INDONESIA

Novie Rarung^{1,*)}, Ivonne S. Saerang²⁾, Hizkia H.D. Tasik³⁾

¹⁾*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Manado*(8-point, *italics*)

²⁾*Universitas Sam Ratulangi, Manado*

³⁾*Universitas Sam Ratulangi, Manado*

e-mail: novie.rarung@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi masalah serius diseluruh negara dan merupakan fokus pencapaian tujuan pertama pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai pada tahun 2030. Indonesia berambisi mencapai kemiskinan nol persen di 2045, dengan tantangan penurunan penduduk miskin yang relatif landai dan disparitas kemiskinan antarkawasan. Studi ini mencoba menguji pengaruh belanja pemerintah di bidang pelindungan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan dana desa terhadap kemiskinan antarkawasan di Indonesia menggunakan data realisasi belanja dan dana desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2016-2022 yang dianalisis dengan menggunakan metode data panel. Temuan menunjukan di KBI, dana desa konsisten mengurangi semua indikator kemiskinan (jumlah, kedalaman/P1, keparahan/P2), belanja kesehatan efektif mengurangi P1 dan P2, tetapi tidak jumlah kemiskinan, sementara itu belanja pendidikan dan perlindungan sosial justru memperburuk kemiskinan. Di KTI, belanja perlindungan sosial meningkatkan semua indikator kemiskinan, dana desa mengurangi jumlah kemiskinan, tetapi memperburuk P1 dan P2, sementara itu belanja pendidikan dan kesehatan, konsisten mengurangi semua dimensi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan KBI lebih unggul dalam pemanfaatan dana desa, tetapi perlu reformasi belanja pendidikan dan perlindungan sosial. Sebaliknya KTI lebih baik dalam belanja pendidikan dan kesehatan, tetapi perlu evaluasi mendasar terhadap alokasi dana desa dan program perlindungan sosial.

Kata kunci: Pengentasan kemiskinan, Belanja Pemerintah, Dana Desa.

1 PENDAHULUAN

Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun tingkat kemiskinan masih signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan (GK) di Indonesia tahun 2024 naik sebesar 2,11 persen dari periode Maret 2024 ke periode September 2024, tertinggi terjadi di perkotaan mencapai 2,31 persen sementara di desa 1,76 persen. Dalam 6 tahun terakhir, rata-rata peningkatan GK mencapai 6,5 persen, sebaliknya jumlah penduduk miskin turun rata-rata hanya sebesar 1,3 persen. Disisi lain tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,34 persen lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 6,6 persen. Pada periode yang sama, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan tren penurunan sejak 2018 hingga mencapai 1,46 pada tahun 2024 yang menggambarkan jumlah penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang tercermin dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun secara rata-rata indeks P1 masih relatif tinggi yakni mencapai 1,59 lebih tinggi dari kondisi terakhir. Hal ini menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin berkisar 1,59 persen di bawah garis kemiskinan jauh lebih tinggi. Disisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) turut menunjukkan tren perbaikan dari indeks 0,44 pada tahun 2018 mencapai indeks 0,35 pada tahun 2024 meskipun secara rata-rata dalam 7 tahun terakhir masih lebih tinggi yakni mencapai 0,39 yang mengindikasikan semakin banyak penduduk miskin dengan pengeluaran relatif mendekati garis kemiskinan, namun dengan kondisi penduduk yang jauh dari garis kemiskinan yang belum linier dengan perbaikan tren tersebut. Data gini ratio dari tahun 2024 juga menunjukkan tren yang menurun mencapai indeks 0,379 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (0,388), namun rata-rata dalam 7 tahun terakhir masih lebih tinggi yakni mencapai 0,384.

GK antarkawasan di Indonesia juga menunjukkan bahwa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik di kota maupun desa menunjukkan tren lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) masing-masing 0,60 persen di kota dan 0,43 persen di desa. Sementara itu, penduduk Indonesia yang berada pada GK lebih tinggi berada di desa (6,41 persen) dibanding di kota (6,38 persen). Pada periode tahun 2021-2022, kemiskinan ekstrem tertinggi terjadi di Provinsi Papua (0,66 persen), Nusa Tenggara Barat (0,57 persen), dan Kalimantan Tengah (0,55 persen) diikuti oleh Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, NTT, Bali, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem (Zaenal et al., 2024). Perbedaan tingkat kemiskinan ini telah dikaitkan dengan faktor-faktor seperti akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi di daerah pedesaan, karakteristik wilayah berupa kepulauan, pengunungan dan pesisir pantai meningkatkan biaya hidup dengan tambahan biaya transportasi, arus barang dan jasa serta keterbatasan akses ke fasilitas-fasilitas dasar yang lebih baik. Selain itu, dampak bencana alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, semakin memperburuk kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia.

Dengan fakta-fakta yang ada, kemiskinan merupakan masalah signifikan di Indonesia bagian timur dan barat, dimana banyak individu dan keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Indonesia bagian timur, tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi karena faktor-faktor seperti akses terbatas ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang kerja. Sebaliknya, di Indonesia bagian barat, daerah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena kepadatan penduduk dan kurangnya perumahan yang terjangkau. Meskipun ada perbedaan ini, kemiskinan tetap menjadi masalah yang meluas di seluruh negeri, mempengaruhi jutaan orang dan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Upaya untuk memerangi kemiskinan di Indonesia merupakan inisiatif pemerintah melalui peningkatan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan program pelatihan kerja telah menjadi bagian dari ambisi pemerintah untuk mewujudkan kemiskinan nol persen dan ketimpangan turun antara 0,29-0,32 pada tahun 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2024) walaupun tuntutan secara global pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk ditargetkan dicapai pada tahun 2030 sesuai Goal 1 *Sustainable Development Goal* (United Nations, 2024). Upaya pemerintah, diwujudkan melalui belanja pemerintah yang ditujukan untuk meredam dampak yang ditimbulkan yang berpotensi mengganggu pencapaian terget pertumbuhan ekonomi yang optimistis yaitu 8 persen (Sekretariat Presiden, 2025) dan tingkat inflasi yang terjaga di 2,5 persen (Kemenkeu, 2024), terdiri dari belanja perlindungan sosial, belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan transfer ke daerah berupa dana desa. Namun, meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, tingkat kemiskinan di Indonesia tetap tinggi, menunjukkan bahwa strategi-strategi saat ini mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam cara dana ini dialokasikan dan digunakan dapat berpotensi menghambat dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah timur dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Ini juga meneliti pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan dana desa untuk menentukan apakah mereka membantu mengurangi kemiskinan di daerah-daerah ini atau memperburuk masalah tersebut. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini dan menganalisis efektivitas pengeluaran pemerintah, kita dapat mengambil langkah-langkah menuju pengurangan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih setara.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Perlindungan sosial

Studi-studi sebelumnya tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan telah memberikan wawasan berharga tentang cara-cara di mana program sosial dapat mengurangi atau memperburuk masalah tersebut. Beberapa studi telah menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti transfer tunai dan program kartu prakerja, dapat membantu mengangkat individu dari kemiskinan dengan memberikan mereka dukungan keuangan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program transfer tunai dan kartu prakerja dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, menawarkan berbagai manfaat kepada rumah tangga yang membutuhkan (Sinaga et al., 2022). Dampak buruk krisis keuangan terhadap kemiskinan ini secara signifikan lebih rendah di negara-negara dengan belanja sosial yang lebih tinggi, yang menunjukkan pentingnya perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan di masa krisis dan potensi keuntungan dari intervensi kebijakan. Di satu sisi, krisis secara signifikan terkait dengan peningkatan kemiskinan yang lebih cepat, di sisi lain, perlindungan sosial, yang dicakup oleh belanja pendidikan dan kesehatan, dapat membantu mengurangi dampak krisis yang merugikan terhadap kemiskinan ini (Assimaïdou et al., 2017). Selain itu, meskipun tingkat pengeluaran tinggi, ketidaksetaraan tetap ada. Hal ini menekankan pentingnya memantau hasil pengeluaran untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan (Boko et al., 2023). Sebuah perspektif yang mencolok datang dari studi oleh Hlásny et al., yang menekankan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah sering kali terhambat oleh kendala administratif dan defisit tata kelola, terutama di negara-negara yang lebih miskin (Hlasny et

al., 2022). Ini menimbulkan pertanyaan tidak hanya tentang berapa banyak yang dibelanjakan tetapi juga seberapa efektif dana tersebut ditargetkan dan dikelola.

Selain itu, efektivitas pengeluaran seringkali tidak seragam di berbagai wilayah atau konteks, dimana dampak respons kebijakan fiskal, seperti pembayaran stimulus selama krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19, menunjukkan baik efek pengurangan jangka pendek pada konsumsi maupun implikasi struktural jangka panjang untuk ketahanan kemiskinan (Bonaccorsi et al., 2020; Rocco et al., 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa respons pemerintah yang mengintegrasikan transfer tunai langsung dapat secara efektif menstabilkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan individu selama masa resesi ekonomi. Singkatnya, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pengentasan kemiskinan didukung dengan baik oleh sejumlah penelitian yang menyoroti bahwa meskipun pendanaan yang memadai penting, keberhasilan pengeluaran ini sebagian besar bergantung pada alokasi strategis mereka terhadap layanan esensial dan kerangka tata kelola yang mengawasinya.

2.2 Belanja Pendidikan

Belanja pemerintah di sektor pendidikan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan yang baik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, sehingga membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Selain itu, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan kapabilitas manusia, yang sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sánchez & Navarro, 2021). Dalam jangka panjang, pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki efek yang kuat dalam mengurangi kejadian kemiskinan di masa dewasa (Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018), sebaliknya antara pengeluaran pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sementara pengeluaran sosial dan kemiskinan dalam jangka pendek berdampak negatif namun memiliki hubungan positif dalam jangka panjang (Celikay & Gumus, 2017).

Dalam konteks pengurangan kemiskinan, alokasi belanja pemerintah untuk pendidikan dapat menghasilkan pengaruh positif yang signifikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berhubungan positif dengan pertumbuhan inklusif di negara-negara berkembang, yang secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Clements et al., 2025). Pendidikan juga berperan dalam kesetaraan sosial, di mana investasi dalam pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sebagai contoh, riset sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara tingkat pendidikan dan partisipasi dalam tenaga kerja, di mana pendidikan yang lebih baik menghasilkan kesempatan kerja yang lebih baik dan, pada akhirnya, mengurangi tingginya angka kemiskinan di pedesaan (Rammohan & Tohari, 2023). Pendidikan yang diakses oleh masyarakat yang kurang mampu menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan bukan hanya meningkatkan pendidikan individual, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, yang merupakan dampak jangka panjang dari pengentasan kemiskinan. Ketika pemerintah memberikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga membantu membangun generasi yang lebih sehat dan berpendidikan, sehingga menciptakan siklus penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2.3 Belanja Kesehatan

Belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana untuk kesehatan dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Investasi pemerintah dalam kesehatan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan berkontribusi pada pengembangan modal manusia, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dapat memperbaiki hasil ekonomi (Kousar et al., 2023). Studi oleh Zhou et al. menunjukkan bahwa program asuransi kesehatan publik yang efektif, seperti National Cooperative Medical Scheme (NCMS) di Tiongkok, dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan memberikan perlindungan finansial bagi rumah tangga, di mana proporsi biaya kesehatan *out-of-pocket* menurun dari 46,4% pada tahun 1995 menjadi 32% pada tahun 2015. Penurunan pengeluaran *out-of-pocket* ini membantu masyarakat miskin untuk mengalihkan sumber daya mereka untuk kebutuhan dasar lainnya, sehingga membantu dalam pengentasan kemiskinan (Zhou et al., 2020). Selain itu, bahwa kebijakan perawatan kesehatan maternal gratis di Ghana mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mengurangi beban finansial pada keluarga miskin. Kebijakan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa risiko kemunduran keuangan yang lebih lanjut, yang berpotensi menurunkan angka kemiskinan (Fosu & Ankrah Twumasi, 2021).

Investasi dalam kesehatan tidak hanya meringankan beban kesehatan tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja sistem kesehatan yang baik berkontribusi pada indikator pembangunan manusia yang lebih tinggi di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, belanja pemerintah di sektor kesehatan sangat penting untuk memfasilitasi perbaikan indikator kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan multidimensional (Dougherty et al., 2022). Dukungan keuangan pemerintah dan kesehatan masyarakat menunjukkan korelasi positif, bahwa peningkatan penyediaan kesejahteraan berkorelasi dengan penurunan angka kematian di Jepang, sehingga secara implisit menangani kemiskinan melalui perbaikan kesehatan (Hasegawa et al., 2021). Secara keseluruhan, belanja pemerintah di bidang kesehatan memberikan landasan yang kuat bagi pengentasan kemiskinan dengan mendorong peningkatan kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung.

2.4 Belanja Dana Desa

Dana desa, sebuah bentuk transfer fiskal kepada pemerintah daerah, telah diterapkan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan dan mengurangi kemiskinan di daerah yang kurang beruntung. Studi menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitasnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti strategi alokasi, kapasitas pemerintahan lokal, dan kondisi sosial-ekonomi. Penelitian terdahulu menunjukkan bagaimana program dana desa telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja di kalangan rumah tangga miskin, dimana akses ke dana desa dapat memberikan dukungan penting untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan (Rammohan & Tohari, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian lain yang secara sistematis menyelidiki apakah transfer dana desa mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Bahwa meskipun beberapa manfaat terlihat jelas, ketimpangan tetap ada, menunjukkan bahwa sekadar

memberikan dana mungkin tidak cukup untuk memerangi kemiskinan yang sudah mengakar secara efektif (Arham & Hatu, 2020).

Selain itu, temuan yang menunjukkan hubungan antara alokasi dana dan ketahanan pangan, secara langsung menyelaraskan alokasi tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memberantas kelaparan, menunjukkan korelasi positif, memperkuat gagasan bahwa dana desa dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar di kalangan komunitas lokal (Manurung et al., 2022). Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun dana ini memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan, efektivitasnya dapat terganggu oleh masalah seperti salah urus dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan lokal, dan peningkatan dana desa yang signifikan faktanya masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan. (Faoziyah & Salim, 2020). Penelitian yang memfokuskan antara dana desa dan hasil kesehatan disimpulkan bahwa dana desa, dikombinasikan dengan kapasitas administratif, secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan terkait kesehatan melalui intervensi yang terarah (Indra & Khoirunurrofik, 2022). Lebih lanjut mendukung wawasan ini, hasil analisis implikasi yang lebih luas dari kebijakan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan disparitas regional ditemukan bahwa meskipun dana-dana ini mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung bisnis lokal, manfaatnya mungkin tidak terdistribusi secara merata di berbagai lapisan masyarakat, yang mengarah pada ketimpangan yang terus-menerus dan kemiskinan yang terlokalisasi (Ernawati et al., 2021; Hartojo et al., 2024). Singkat kata, dana desa memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi pengurangan kemiskinan di pedesaan Indonesia, akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada struktur tata kelola yang ada, alokasi yang terarah, dan kemampuan untuk mengintegrasikan kebutuhan lokal ke dalam strategi pengelolaan dana.

3 METODOLOGI

Studi ini mengkaji realisasi belanja pemerintah di seluruh Indonesia dengan fokus pada belanja perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan Dana Desa dari Transfer ke Daerah. Data belanja pemerintah diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sementara data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini berfokus pada realisasi belanja periode tahun 2017 hingga 2022. Studi ini mengandalkan metode regresi data panel.

Persamaan model ketimpangan pada kota dan kabupaten i , pada tahun t yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$y_{it} = a + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + \dots + b_kx_{kit} + c_i + e_{it}$$

di mana y_{it} merupakan indikator kemiskinan yang diukur oleh GK KTI dan KBI dari tahun 2017 sampai 2022 yang merupakan periode studi; x_{kit} merupakan variabel-variabel belanja pemerintah KTI dan KBI; b_k merupakan koefisien dari variabel-variabel belanja pemerintah, c_i merupakan parameter yang invarian selama periode studi; sedangkan e_{it} merupakan residual.

Sebelum studi ini menyajikan hasil analisa, berikut merupakan ringkasan statistik dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 1. Ringkasan Statistik

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
tahun	3,794	2019	-	2016	2022
Jumlahmiskin	3,794	92.59531	307.8645	0	4617.01
p1	3,794	2.120306	2.026975	0	16.35
p2	3,794	0.591394	0.826319	0	8.68
angkes	3,794	3.00E+11	4.85E+11	1.48E+09	1.08E+13
angdik	3,794	5.72E+11	1.12E+12	3.35E+08	2.18E+13
anglinsos	3,794	2.83E+10	8.95E+10	0	3.90E+12
dana_desa	3,038	1.47E+11	9.58E+10	6.48E+09	6.35E+11

Sumber: Data Penulis

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Kinerja Belanja Pemerintah dan Dana Desa di Indonesia

Penelitian ini berupaya mengungkapkan pengaruh belanja urusan perlindungan sosial, belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, dan dana desa terhadap kemiskinan. Analisa yang dilakukan pada studi ini dimulai dengan menggali hubungan antara kemiskinan dengan belanja-belanja pemerintah tersebut dan dana desa.

Tabel 2. menyajikan hasil analisis secara nasional (Indonesia) pengaruh belanja pemerintah dan dana desa terhadap variabel-variabel kemiskinan. Penelitian ini diawali dengan menganalisis ketiga variabel kemiskinan menggunakan data belanja pemerintah dan dana desa di kabupaten dan kota di Indonesia.

Secara nasional, pengeluaran untuk perlindungan sosial terlihat memiliki dampak yang sangat besar dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin $-2.90e-11$ ($p<0.001$), yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam belanja perlindungan sosial dapat secara signifikan membantu dalam mengurangi jumlah orang miskin, namun sebaliknya justru meningkatkan P1 dan P2. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa belanja pemerintah dalam program perlindungan sosial berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan akses pada layanan dasar (Sánchez & Navarro, 2021). Namun, belanja pendidikan memiliki hasil yang lebih kompleks. Meskipun pengeluaran pendidikan berhubungan positif dengan penduduk miskin ($1.13e-11$, $p<0.001$), ada dampak negatif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan (p1) ($-3.72e-13$, $p<0.05$) dan tingkat keparahan kemiskinan (p2) ($-2.26e-13$, $p<0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan diperlukan untuk meningkatkan mobilitas ekonomi ke depan, dampak jangka pendeknya mungkin tidak cukup untuk langsung mengurangi angka kemiskinan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan bahwa investasi pendidikan harus disertai dengan kebijakan efektif lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan (Shammi et al., 2020).

Tabel 2. Jumlahmiskin, p1, dan p2 di Indonesia

VARIABEL	(1) Jumlahmiskin	(2) p1	(3) p2
anglinsos	-2.90e-11*** (6.21E-12)	1.93e-12** (5.98E-13)	1.08e-12** (3.34E-13)
angdik	1.13e-11*** (2.05E-12)	-3.72e-13* (1.85E-13)	-2.26e-13* (9.68E-14)
angkes	1.05e-11*** (2.66E-12)	-8.90e-13*** (2.53E-13)	-4.80e-13*** (1.40E-13)
dana_desa	-6.37e-11*** (5.77E-12)	-1.20e-12* (5.24E-13)	2.29E-14 (2.73E-13)
_cons	56.55*** (1.962)	2.826*** (0.118)	0.839*** (0.0526)
N	3038	3038	3038

Standard errors in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Di sisi lain, belanja kesehatan menunjukkan hasil yang meningkatkan jumlah kemiskinan dengan koefisien positif sementara itu signifikan menurunkan P1 dan P2 dengan p<0.001, Temuan ini bertolak belakang dengan hasil bahwa pengeluaran fiskal memainkan peran yang jauh lebih signifikan dalam mengurangi rasio kemiskinan (Zeng et al., 2021). Sementara itu, dana desa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (-6.37e-11, p<0.001) di Indonesia, tetapi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan untuk p2, menandakan bahwa meski dana desa berkontribusi dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, dampaknya terhadap keparahan kemiskinan adalah terbatas. Peneliti dalam studi lain menyarankan pentingnya implementasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap program berbasis dana masyarakat untuk mencapai dampak optimal (Hassan et al., 2020).

4.2. Kinerja Belanja Pemerintah dan Dana Desa di KBI

Hasil analisis pengaruh belanja pemerintah dan dana desa terhadap variabel-variabel kemiskinan untuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) disajikan dalam Tabel 3. Hasil yang ambigu ditunjukkan oleh belanja perlindungan sosial terhadap jumlah penduduk miskin di KBI dengan hasil yang tidak signifikan, sementara nilai untuk p1 dan p2 secara mengejutkan menunjukkan dampak pengeluaran ini berkontribusi memperburuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa meskipun jumlah individu yang miskin menurun, kualitas kemiskinan masih ada, di mana orang-orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan masih mengalami kedalaman dan keparahan yang lebih besar. Pengeluaran pendidikan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk miskin, demikian juga p1 dan p2, yang menandakan bahwa belanja pendidikan turut berkontribusi memperparah jumlah penduduk miskin maupun kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sementara itu, peningkatan pengeluaran di sektor kesehatan berkontribusi meningkatkan jumlah penduduk miskin dengan relevansi yang lebih nyata, namun pengeluaran kesehatan menunjukkan hasil yang diharapkan, yang menunjukkan bahwa akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Temuan ini mendukung banyak penelitian yang menegaskan bahwa investasi di

sektor kesehatan adalah salah satu strategi kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Tabel 3. Jumlahmiskin, p1, dan p2 di KBI

VARIABEL	(1) Jumlahmiskin	(2) p1	(3) p2
anglinsos	-9.12e-12 (2.34e-11)	2.23e-12* (9.62e-13)	7.97e-13* (3.89e-13)
angdik	1.28e-11*** (2.94e-12)	2.32e-13* (1.10e-13)	9.55e-14* (4.08e-14)
angkes	1.66e-11*** (3.86e-12)	-3.45e-13* (1.54e-13)	-1.90e-13** (6.00e-14)
dana_desa	-8.11e-11*** (8.28e-12)	-1.49e-12*** (3.11e-13)	-2.34e-13* (1.14e-13)
_cons	71.01*** (3.023)	1.783*** (0.0762)	0.412*** (0.0240)
N	1848	1848	1848

Standard errors in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Dana desa menunjukkan hasil yang signifikan berkontribusi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu, dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada P1 dan P2. Temuan ini mengerucut pada pentingnya alokasi dan pengelolaan dana desa yang efisien untuk mengurangi rumah tangga miskin (Anam et al., 2023b) sehingga memunculkan perbedaan tingkat kemiskinan di desa yang telah menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa (Oktavia & Wihastuti, 2020). Secara keseluruhan, ditemukan bahwa, terlepas dari pengeluaran yang meningkat di banyak sektor, pemantauan, dan evaluasi yang tepat dari dampak pengeluaran tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pengentasan kemiskinan tercapai secara efektif di kawasan Barat Indonesia.

4.3. Kinerja Belanja Pemerintah dan Dana Desa di KTI

Hasil analisis` pengaruh belanja pemerintah dan dana desa terhadap variabel-variabel kemiskinan untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) disajikan dalam Tabel 4 berikut. Di KTI, temuan menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengeluaran perlindungan sosial di KTI secara signifikan berhubungan dengan peningkatan semua dimensi kemiskinan.. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengeluaran perlindungan sosial ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, dampaknya tidak efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan di kawasan ini atau semakin memperburuk kemiskinan. Sebaliknya, temuan sebelumnya menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahannya (Putri & Purnamadewi, 2024). Hasil belanja pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh negatif dengan jumlah penduduk miskin, demikian juga p1 dan p2 dimana pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan dalam mengurangi

kedalaman dan keparahan kemiskinan, sementara peningkatan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sebaliknya dana desa, meskipun mampu berkontribusi menurunkan penduduk miskin namun P1 dan P2 justru mengalami peningkatan. Hasil ini sesuai dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya manajemen dan perencanaan penggunaan dana desa yang lebih efektif (Arham & Hatu, 2020; Rima Nurmala et al., 2023). Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pengeluaran dalam perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan dana desa untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Timur Indonesia, hasil yang beragam menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih luas dan strategis dalam mengintegrasikan belanja pemerintah untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Tabel 4. Jumlahmiskin, p1, dan p2 di KTI

VARIABEL	(1) Jumlahmiskin	(2) p1	(3) p2
anglinsos	9.72e-12*** (2.85e-12)	7.42e-12*** (1.27e-12)	3.82e-12*** (7.14e-13)
angdik	-3.20e-12* (1.30e-12)	-1.68e-12** (5.83e-13)	-8.35e-13* (3.29e-13)
angkes	-3.55e-12* (1.58e-12)	-3.65e-12*** (7.27e-13)	-1.88e-12*** (4.21e-13)
dana_desa	-1.71e-11*** (3.60e-12)	3.16e-12* (1.48e-12)	2.28e-12** (7.88e-13)
_cons	34.22*** (1.586)	4.023*** (0.245)	1.292*** (0.121)
N	1190	1190	1190

Standard errors in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.4 Diskusi

Hasil analisis pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di Indonesia, terutama di kawasan Timur dan Barat, menyajikan berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Dalam konteks pengeluaran pemerintah, terdapat perbedaan nyata dalam alokasi dana dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan di kedua kawasan ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan. Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan dana desa menjadi fokus utama dalam menangani masalah kemiskinan di kedua kawasan. Hasil yang ada menunjukkan perbedaan signifikan dalam dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di dua wilayah dan jelas ini belum menggembirakan. Temuan menunjukkan, intervensi fiskal melalui belanja perlindungan sosial tidak mampu meredam memburuknya semua indikator kemiskinan baik di barat maupun di timur. Hal ini dapat saja terjadi, temuan terdahulu menunjukkan bahwa antara belanja sosial dan kemiskinan memiliki hubungan negatif dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang hubungannya menjadi terbalik, yang mengindikasikan bahwa belanja sosial lebih bersifat

memberi makan atau menumbuhkan daripada mengentaskan kemiskinan. Efek ini dapat disebut sebagai "jebakan belanja sosial", yaitu kondisi dimana semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada program-program belanja sosial, bukannya bekerja untuk mencari nafkah, sekalipun belanja sosial meningkat (Celikay & Gumus, 2017). Selain itu, hasil ini mengindikasikan adanya inefisiensi alokasi atau program sosial yang tidak tepat sasaran karena tidak diketahui secara pasti jumlah keluarga miskin, sehingga belum mampu menjangkau keluarga miskin dan kelompok rentan, dan adanya permasalahan yang kompleks sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun secara teori maupun empiris, belanja sosial dapat menjadi jaring pengaman sosial dan menekan kemiskinan, namun bukti lain menunjukkan bahwa efektivitasnya dapat terganggu oleh kendala yang bersifat administratif dan permasalahan tata kelola.

Belanja publik di bidang pendidikan di Indonesia, terutama di Kawasan Timur dan Barat, memainkan peranan penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan serta memberikan peluang kerja yang lebih baik untuk masyarakat yang kurang mampu karena meningkatnya sumber daya manusia (Farayibi & Folarin, 2021; Kousar et al., 2023). Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dampak positif dari investasi pendidikan lebih terlihat, dengan pengurangan semua indikator kemiskinan secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek seperti peningkatan akses tetapi juga tetapi juga memperkuat basis sumber daya manusia yang menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah maupun panjang (Kim & Ahn, 2020). Bukti statistik menunjukkan perbedaan dampak investasi pendidikan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Di KTI, pengeluaran pendidikan telah diikuti dengan penurunan indikator kemiskinan yang komprehensif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, di KBI terdapat indikasi kontradiktif di mana pengeluaran pendidikan justru berkontribusi memperburuk kemiskinan. Temuan ini menyiratkan apabila penerapan program pendidikan di KBI belum mencapai efektivitas yang optimal, mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti alokasi fiskal, manajemen dana, atau ketidakselarasan antara program pendidikan dan kebutuhan spesifik daerah. Oleh karena itu, dinyatakan urgensi untuk melakukan penelitian lanjutan yang mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor nonpendidikan atau hambatan struktural yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengeluaran pendidikan di KBI. Analisis lebih lanjut terhadap dinamika fiskal lokal dan mekanisme transfer antar pemerintah, seperti yang telah dibahas dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat. Selain itu, evaluasi terhadap program pendidikan yang telah berjalan perlu mengungkap apakah kekurangan pada infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, atau pendekatan pembelajaran yang diterapkan turut berperan dalam menurunkan dampak positif pengeluaran pendidikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Belanja publik di bidang kesehatan telah menjadi instrumen fiskal yang strategis dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan, terutama melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini didasarkan pada peran penting kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan manusia, meningkatkan harapan hidup, dan pendapatan per kapita yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan ketimpangan (Miranda-Lescano et al., 2023). Dalam kawasan Timur Indonesia (KTI), data empiris menunjukkan bahwa belanja

publik di bidang kesehatan memiliki pengaruh yang kuat, positif dan terukur dalam menurunkan semua indikator kemiskinan secara komprehensif. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan di KTI menunjukkan korelasi dengan penurunan semua indikator kemiskinan yang mencerminkan keberhasilan keberhasilan intervensi tersebut dalam mengurangi risiko kesehatan dan yang memicu kemiskinan. Pengukuran terhadap indikator kemiskinan di KTI tidak hanya mencakup jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, sehingga menggambarkan dampak yang lebih luas dari intervensi kesehatan. Strategi penganggaran yang efektif di sektor kesehatan di KTI turut mendukung peningkatan kesetaraan layanan kesehatan, yang pada gilirannya menguatkan modal manusia. Berbeda dengan KTI, Kawasan Barat Indonesia (KBI) menunjukkan dinamika yang berbeda di mana pengurangan terjadi terutama pada tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin secara absolut justru mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam aspek-aspek intensitas kemiskinan, respons terhadap alokasi belanja kesehatan di KBI tidak secara menyeluruh menurunkan jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas program belanja kesehatan yang masih berfokus pada pengurangan dampak kerugian kesehatan tanpa mampu menangkap keunikan konteks sosial ekonomi lokal. Perbedaan hasil antara KTI dan KBI menunjukkan adanya variasi struktural dalam cara pengelolaan dan distribusi dana publik serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi perbedaan efektivitas program kesehatan di kedua kawasan tersebut, seperti dinamika demografis dan turbulensi ekonomi global.

Dana desa merupakan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan pembangunan pedesaan dengan tujuan utama pengurangan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Temuan terdahulu mengungkapkan bahwa dana desa memiliki efek yang cukup besar terhadap penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai yang memperkuat daya beli masyarakat maupun manfaat tambahan bagi kemajuan desa, seperti pembangunan infrastruktur, meskipun pelaksanaan dana desa masih terdapat masalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah yang terus berlanjut (Anam et al., 2023a). Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen desa di kawasan Barat yang memanfaatkan dana desa berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Rifai et al., 2024). Di kawasan Barat, efektivitas program ini telah terbukti dengan penurunan signifikan di semua indikator kemiskinan. Keberhasilan ini didorong oleh partisipasi masyarakat dan kapasitas administrasi yang lebih kuat serta adanya mekanisme pengawasan yang transparan. Perbedaan signifikan antara kawasan Barat dan Timur dalam pemanfaatan dana desa menggarisbawahi pentingnya kapasitas administrasi dan akuntabilitas di tingkat desa. Meskipun dana desa dialokasikan di kawasan Timur untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dampaknya pada indikator kemiskinan, terutama kedalaman dan keparahan kemiskinan, masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat penting dalam menentukan efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan. Di wilayah Barat, penerapan prinsip tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat telah meningkatkan efektivitas pengeluaran dana desa, yang berkontribusi pada penurunan indikator kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, di kawasan Timur, di mana administrasi desa masih lemah dan potensi penyalahgunaan jauh lebih tinggi, alokasi dana desa belum mampu mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Mekanisme pengawasan masyarakat yang menguatkan modal sosial berkontribusi besar terhadap keberhasilan pengurangan kemiskinan dengan membangun sistem *feedback* dan akuntabilitas. Dengan peningkatan pelatihan

kapasitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan transparansi dan efisiensi penggunaan dana desa dapat meningkat.

5 KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah di kawasan Timur telah meningkat secara signifikan, dampaknya terhadap kemiskinan masih terjebak dalam konteks yang kompleks. Ini berarti bahwa pengeluaran yang berlipat ganda tidak selalu berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan. Di kawasan Barat, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan pada umumnya efek yang lebih positif dalam menurunkan angka kemiskinan, dengan alokasi dana yang lebih terstruktur dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. sebaliknya di kawasan Timur, meskipun terdapat pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi, efektivitasnya terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas administratif yang lemah dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan dana secara optimal. Hal ini berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan meskipun pengeluaran meningkat, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggaran tidak cukup tanpa adanya dukungan sistemik dan implementasi yang baik.

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pertama, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan jumlah pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa pengeluaran tersebut tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Kedua, program dana desa yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat di kawasan Timur perlu dioptimalkan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa perlu ditekankan di mana kejelasan dan akuntabilitas dalam pengeluaran harus diperkuat dengan pelibatan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan program ini. Ketiga, kebijakan harus melibatkan analisis regional secara lebih mendalam untuk memahami konteks spesifik dari setiap kebijakan yang diterapkan. Pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan di kawasan Barat dapat diaplikasikan ke kawasan Timur dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, demikian juga sebaliknya. Selain itu, penguatan sinergi antara pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus dioptimalkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya tidak hanya memperbesar anggaran pengeluaran pemerintah, tetapi juga mengelola dan mengimplementasikan tindakan yang lebih strategis agar dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan dengan lebih efektif. Pendekatan yang berbasis pada bukti dan berbasis pada konteks lokal akan jauh lebih berpotensi dalam mengurangi belenggu kemiskinan, terutama di kawasan yang tertinggal seperti kawasan Timur Indonesia.

REFERENSI

- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023a). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023b). Village Funds and Poverty Reduction in Indonesia: New Policy Insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433–442. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO10.433>
- Assimaïdou, K., Kiendrebeogo, Y., & Tall, A. (2017). Social Protection For Poverty Reduction in Times of Crisis. *Journal of Policy Modeling*, 39(6), 1163–1183. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.09.003>
- Boko, J., Raju, D., & Younger, S. D. (2023). Government social protection programme spending and household welfare in Lesotho. *South African Journal of Economics*, 91(3), 375–393. <https://doi.org/10.1111/saje.12341>
- Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., Schmidt, A. L., Valensise, C. M., Scala, A., Quattrociocchi, W., & Pammolli, F. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(27), 15530–15535. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>
- Celikay, F., & Gumus, E. (2017). The Fffect of Social Spending on Reducing Poverty. *International Journal of Social Economics*, 44(5), 620–632. <https://doi.org/10.1108/ijse-10-2015-0274>
- Clements, B., Gupta, S., & Jalles, J. T. (2025). Public Spending and Inclusive Growth in Developing Asia. *Public Finance Review*, 53(2), 139–168. <https://doi.org/10.1177/10911421241296203>
- Dougherty, S., Lorenzoni, L., Marino, A., & Murtin, F. (2022). The Impact of Decentralisation On The Performance of Health Care Systems: A Non-Linear Relationship. *The European Journal of Health Economics*, 23(4), 705–715. <https://doi.org/10.1007/s10198-021-01390-1>
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Farayibi, A. O., & Folarin, O. (2021). Does Government Education Expenditure Affect Educational Outcomes? New Evidence From Sub-Saharan African Countries. *African Development Review*, 33(3), 546–559. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12588>
- Fosu, P., & Ankrah Twumasi, M. (2021). The Effect of Government Expenditure And Free Maternal Health Care Policy (FMHC) on Household Consumption in Ghana. *Journal of Economics and Development*, 23(2), 184–202. <https://doi.org/10.1108/JED-07-2020-0088>
- Hartojo, N., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Sumarto, S. (2024). The Impact of Village Funds on Rural Welfare in Indonesia: A Regression Discontinuity in Time (RDiT) And Difference in Difference (DiD) Approach. *Applied Economics Letters*, 31(15), 1360–

1367. <https://doi.org/10.1080/13504851.2023.2187016>
- Hasegawa, T., Fukuyama, K., & Okada, M. (2021). Relationships between Expenditure of Regional Governments and Suicide Mortalities Caused by Six Major Motives in Japan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 84. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010084>
- Hassan, M. S., Bukhari, S., & Arshed, N. (2020). Competitiveness, Governance And Globalization: What Matters For Poverty Alleviation? *Environment, Development and Sustainability*, 22(4), 3491–3518. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00355-y>
- Hidalgo-Hidalgo, M., & Iturbe-Ormaetxe, I. (2018). Long-run effects of public expenditure on poverty. *The Journal of Economic Inequality*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10888-017-9360-z>
- Hlasny, V., Asabullah, M. N., & Alia, S. (2022). The Adoption of the Multidimensional Poverty Index in Developing Asia: Implications for Social Program Targeting and Inequality Reduction. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(3). <https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5603-10>
- Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding The Role of Village Fund And Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence From Indonesia. *PLOS ONE*, 17(1), e0262743. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743>
- Kemenkeu. (2024, Agustus). *Komisi XI DPR RI Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Komisi-XI-Sepakati-Asumsi-Dasar-APBN-2025>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Indonesia Emas 2045. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*. <https://indonesia2045.go.id/>
- Kim, S., & Ahn, S. (2020). Social Investment Effects of Public Education, Health Care, And Welfare Service Expenditures on Economic Growth. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(1), 34–44. <https://doi.org/10.1111/aswp.12190>
- Kousar, S., Ahmed, F., Afzal, M., & Segovia, J. E. T. (2023). Is Government Spending in The Education And Health Sector Necessary for Human Capital Development? *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 62. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01514-3>
- Manurung, E. T., Maratno, S. F. E., Permatasari, P., Rahman, A. B., Qisthi, R., & Manurung, E. M. (2022). Do Village Allocation Funds Contribute towards Alleviating Hunger among the Local Community (SDG#2)? An Insight from Indonesia. *Economies*, 10(7), 155. <https://doi.org/10.3390/economies10070155>
- Miranda-Lescano, R., Muñelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human development And Decentralization: The Importance of Public Health Expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund and its Impact on Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 24(1), 79. <https://doi.org/10.22146/jkap.43237>
- Putri, A. R., & Purnamadewi, Y. L. (2024). Dampak Perlindungan Sosial dan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Indonesia. *IPB Repository*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/152927>
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural Poverty And Labour Force Participation: Evidence From Indonesia's Village Fund Program. *PLOS ONE*, 18(6), e0283041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages.

- Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 32(3), 1115–1140.
<https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15>
- Rima Nurmala, Ade Sudarma, & Evi Martaseli. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 425–435. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1329>
- Rocco, P., Béland, D., & Waddan, A. (2020). Stuck in neutral? Federalism, policy instruments, and counter-cyclical responses to COVID-19 in the United States. *Policy and Society*, 39(3), 458–477. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783793>
- Sánchez, A., & Navarro, M. (2021). Public Policies of Welfare State and Child Poverty in the European Union. *Sustainability*, 13(5), 2725. <https://doi.org/10.3390/su13052725>
- Sekretariat Presiden. (2025, January 16). *Presiden Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-8-persen/>
- Shammi, M., Bodrud-Doza, Md., Towfiqul Islam, A. R. Md., & Rahman, Md. M. (2020). COVID-19 Pandemic, Socioeconomic Crisis And Human Stress in Resource-Limited Settings: A Case From Bangladesh. *Heliyon*, 6(5), e04063. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04063>
- Sinaga, E., Lubis, T., Situmorang, E., & Harahap, A. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- United Nations. (2024). *Goals 1 End poverty in all its forms everywhere*. <https://sdgs.un.org/goals/goal1>
- Zaenal, H. M., Hartono, N., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Burhanudin, M. S., Sakinah, M., Adibah, N., & Syafiqah, F. (2024, April). *Peta Kemiskinan Ekstrem Nasional*. Puskas Baznas. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1863-peta-kemiskinan-ekstrem-nasional>
- Zeng, G., Zhang, C., Li, S., & Sun, H. (2021). The Dynamic Impact of Agricultural Fiscal Expenditures and Gross Agricultural Output on Poverty Reduction: A VAR Model Analysis. *Sustainability*, 13(11), 5766. <https://doi.org/10.3390/su13115766>
- Zhou, Y., Guo, Y., & Liu, Y. (2020). Health, income and poverty: Evidence from China's rural household survey. *International Journal for Equity in Health*, 19(1), 36. <https://doi.org/10.1186/s12939-020-1121-0>